

PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA DIY





PERMASALAHAN KELUARGA (FISIK & NON-FISIK)

PERMASALAHAN



- **Permasalahan sosial** yang terjadi di DIY banyak disebabkan kurang berfungsinya fungsi **keluarga**
- **Perkembangan teknologi** memicu perubahan nilai, baik nilai budaya lokal maupun nilai sosial



**JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA
MENURUT SUMBER PERMOHONAN DAN WILAYAH PENGADILAN AGAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN 2015 DAN 2016

No.	Wilayah PA	2015			2016		
		Jml Kasus	Sumber Permohonan		Jml Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
1.	Wates	582	177	405	574	173	401
2.	Bantul	1240	324	916	1371	430	941
3.	Wonosari	1447	437	1,010	1363	429	934
4.	Sleman	1360	397	963	1551	468	1,083
5.	Yogyakarta	592	156	436	633	133	500
	DIY	5221	1491	3730	5492	1633	3859

Sumber data: Pengadilan Tinggi Agama DIY

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No.	Faktor	Jumlah
1	Meninggalkan salah satu pihak	196
2	KDRT	4
3	Cacat	3
4	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	336
5	Ekonomi	Sumber: Pengadilan Agama Yogyakarta, 2016

**JUMLAH PUTUSAN DISPENSASI KAWIN YANG
DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN AGAMA
TAHUN 2014, 2015 dan
2016**

No.	PA	DISPENSAI KAWIN 2014	DISPENSAI KAWIN	
			2015	2016
1.	PA Wates	37	45	41
2.	PA Bantul	93	116	87
3.	PA Wonosari	96	109	79
4.	PA Sleman	159	122	103
5.	PA Yogyakarta	28	26	36
6.	D.I. Yogyakarta	413	418	346

Sumber data: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

**JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015**



No.	KAB./KOT A	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kulonprogo	29	12	41	79	76	155	32	12	44
2.	Bantul	12	3	15	30	12	42	43	21	64
3.	Gunungkidu I	8	4	12	44	14	58	49	17	66
4.	Sleman	23	6	29	21	7	28	23	25	48
5.	Yogyakarta	1	-	1	9	5	14	139	36	175
	Jumlah	73	25	98	183	114	297	286	111	397

**Su ber ata : Dinas Sosia , Up ating Data
PMK& I**

**JUMLAH ANAK YANG HIDUP DI JALAN MENURUT JENIS
KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

TAHUN 2015 DAN 2016

No.	KAB./KOTA	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		L	P	Total	L	P	Total
1.	Kulonprogo	14	30	44	13	5	18
2.	Bantul	30	22	52	88	82	170
3.	Gunungkidul	44	3	47	33	17	50
4.	Sleman	24	10	34	35	27	62
5.	Yogyakarta	29	13	42	17	10	27
	Jumlah	141	78	219	186	141	327

Sumber data : Dinas Sosial, Updating Data PMKS

**JUMLAH ANAK TERLANTAR MENURUT JENIS KELAMIN DAN
KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015 DAN 2016**

No.	KAB./KOTA	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		L	P	Total	L	P	Total
1.	Kulonprogo	2,301	2,142	4,443	2,093	1,777	3,870
2.	Bantul	1,881	1,460	3,341	1,286	1,106	2,392
3.	Gunungkidul	3,808	2,969	6,777	2,327	1,871	4,198
4.	Sleman	2,916	2,281	5,197	2,023	1,632	3,655
5.	Yogyakarta	186	145	331	164	143	307
	Jumlah	11,092	8,997	20,089	7,893	6,529	14,422

**Sumber data : Dinas Sosial, Updating Data PMKS (Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial) 2016**

**JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM M
JENIS KELAMIN DAN ASAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGY
TAHUN 2015**

**ENURU
T
AKART
A**

No.	KAB./KOTA ASAL	TAHUN 2015		Total
		Jenis Kelamin		
		L	P	
1.	Kulonprogo	14	4	18
2.	Bantul	38	9	47
3.	Gunungkidul	5	2	7
4.	Sleman	67	17	84
5.	Yogyakarta	12	2	14
6.	Luar DIY	20	5	25
Jumlah		156	39	195

Sumber data : Dinas Sosial, Updating Data PMKS

Ket. merupakan jumlah APH yang ditangani di DSP

Dasar Kebijakan Pembangunan Keluarga

Konsep Ketahanan Keluarga dalam UU lama dan baru



UU 10 Tahun 1992:

“Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta **mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual** guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”

UU 52 Tahun 2009:

“Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta **mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri** dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”

Kebijakan Pembangunan Keluarga UU. No. 52 tahun 2009

13

Tujuan

- (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk **meningkatkan kualitas keluarga** agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Prinsip-prinsip dalam UU no. 52 tahun 2009

14

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan** kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;**
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.**

PEMBANGUNAN KELUARGA

(Bab VII UU No 52/2009)

Pasal 47

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah **menetapkan kebijakan pembangunan keluarga** melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat **melaksanakan fungsi keluarga secara optimal**.

Pasal 48

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 **dilaksanakan dengan cara:**



- a. peningkatan **kualitas anak** dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan **kualitas remaja** dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan **kualitas hidup lansia** agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan **keluarga rentan** dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan **kualitas lingkungan** keluarga;



- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi **melalui usaha mikro keluarga**;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan **bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin**; dan
- h. penyelenggaraan upaya **penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga**.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan **peraturan menteri** yang terkait sesuai dengan kewenangannya.



FILOSOFI PEMBANGUNAN KELUARGA

DASAR FILOSOFI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA



NILAI-NILAI KELUARGA DAN KEBUDAYAAN DIY



Kedudukan keluarga dalam masyarakat jawa

“Keluarga sebagai suatu lembaga sosial merupakan landasan bagi tingkah laku sosial dalam masyarakat Jawa di Yogyakarta” (Soemardjan, 1981).

Dalam keluarga Jawa, hubungan yang terjalin dalam keluarga inti (*nucleus family*) atau *somah* merupakan pertalian keluarga yang dianggap penting

marsudi mrih widadaning palakrama (berusaha untuk menjaga keutuhan dan keselamatan pernikahan)

rukun agawe santosa, crah agawe bubrah (kerukunan membuat kuat, perselisihan membuat rusak)

Nilai-nilai Dasar Pembangun Keluarga Jawa

- **Nilai Ketuhanan**

sangkan paraning dumadi

- **Keselarasan dan Keharmonisan**

- **Keterlibatan dan Kontribusi**

hamangku (melayani), *hamengku* (melindungi dengan keadilan dan kasih sayang), *hamengkoni* (kesedian bertanggungjawab atas amanah yang disematkan kepadanya) dan *Hamemayu Hayuning Bawana* (memperindah keindahan semesta)

- **Kemenyatuan dan Kelentingan**

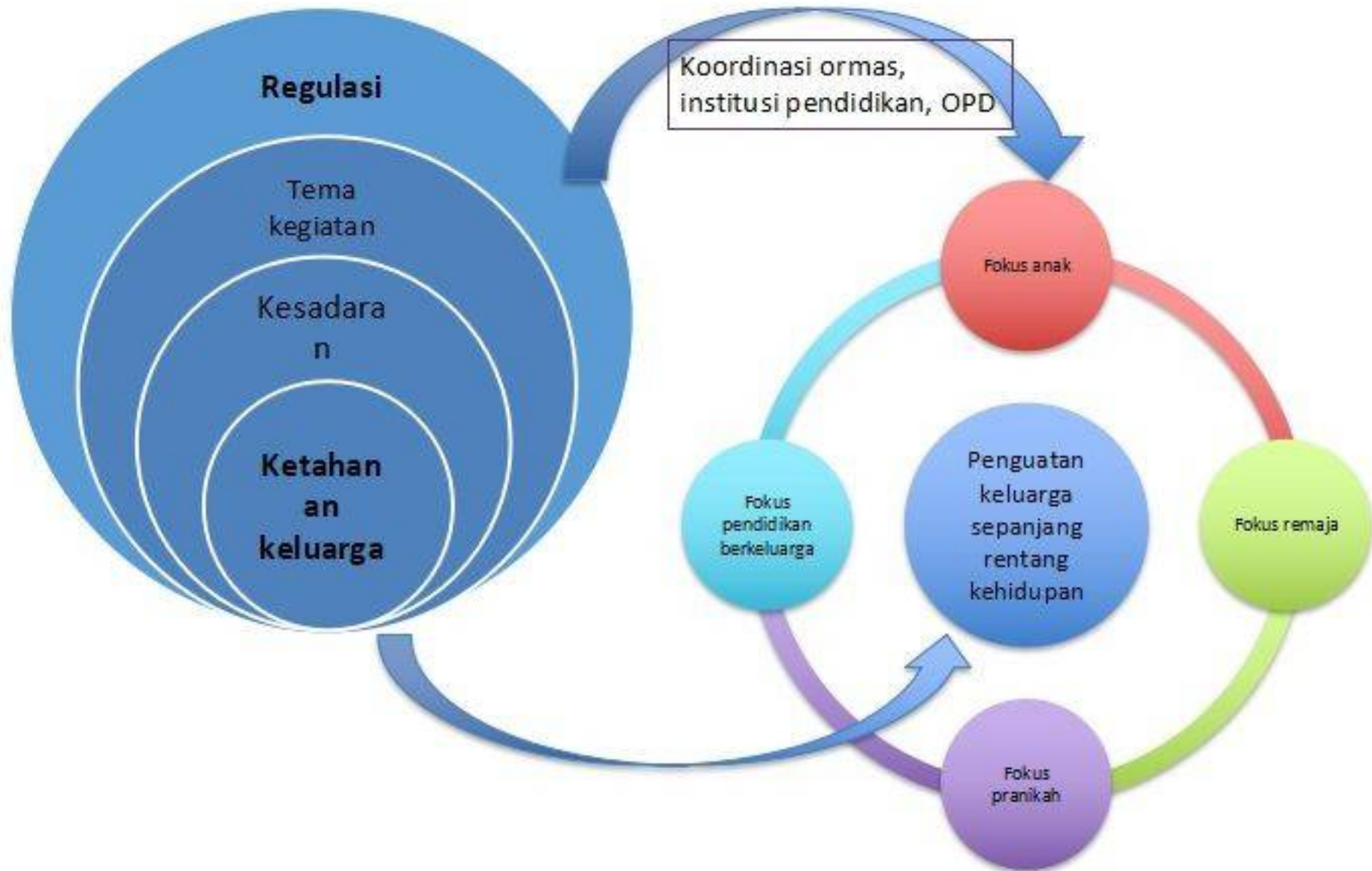
sawiji (menyatu), *greget* (bersemangat), *sungguh* (yakin tanpa jumawa), dan *ora mingkuh* (berkemauan keras serta bertanggung jawab)

TUJUAN *PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA*



- Mewujudkan **Keluarga Tangguh**.
- Memberikan **arah pelaksanaan kebijakan** ketahanan keluarga dalam 5 tahun (2018-2023).
- Mewujudkan program ketahanan keluarga secara **berkelanjutan**.

Grand Desain Ketahanan Keluarga



Konsep Ketahanan Keluarga

24

Ketahanan Keluarga Indonesia

KETAHANAN
FISIK

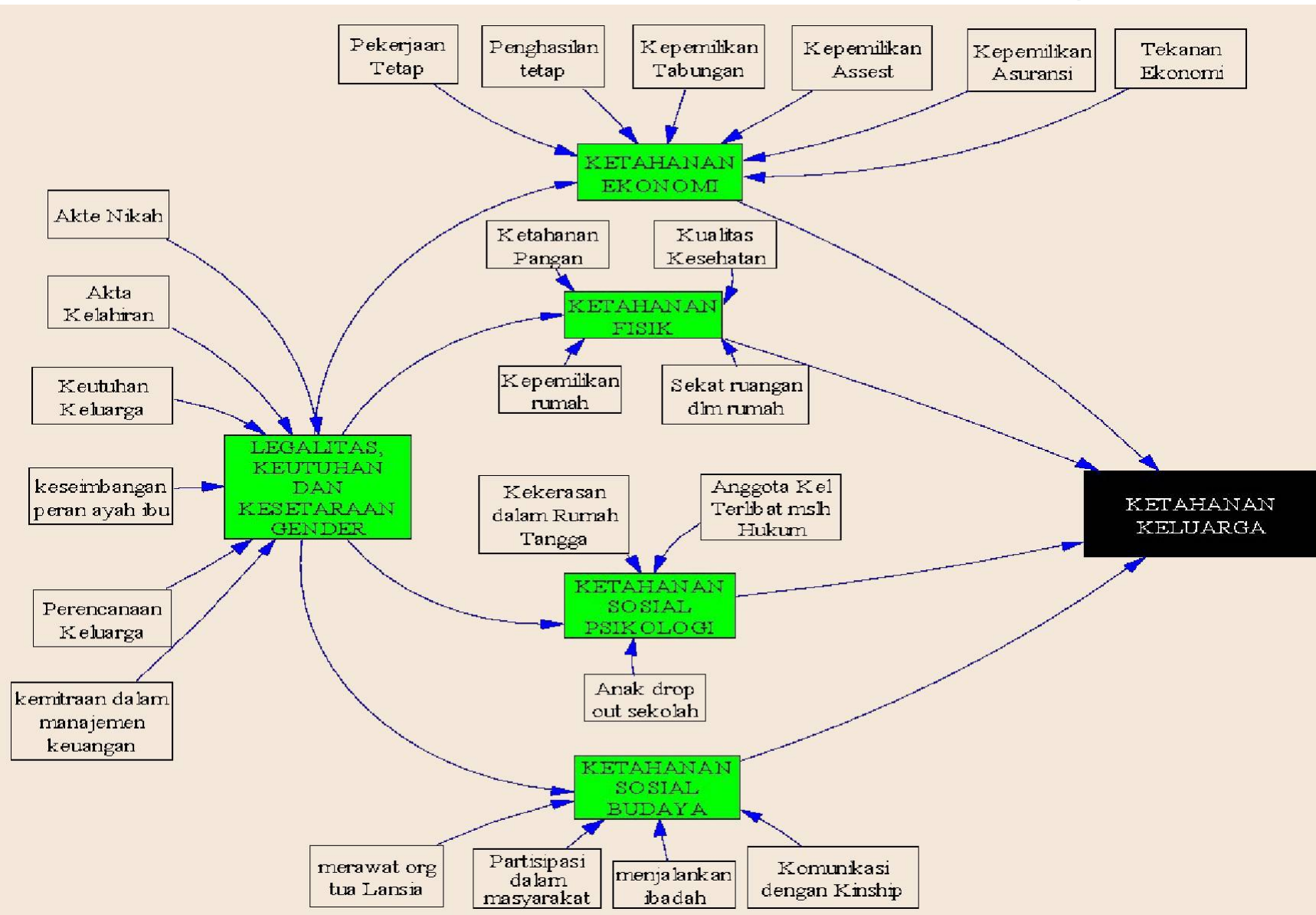
KETAHANAN
EKONOMI

KETAHANAN
SOSIAL
PSIKOLOGI

KETAHANAN
SOSIAL
BUDAYA

Legalitas, Struktur dan
kesetaraan gender

Komponen Ketahanan Keluarga



PERMASALAHAN KETAHANAN KELUARGA



- **Permasalahan keluarga di masyarakat**
 - Hilangnya kesakralan pernikahan
 - Lingkungan tidak kondusif
 - Pernikahan dini
 - Penyalahgunaan teknologi informasi

Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dalam Ketahanan Keluarga



- Penyusunan Buku Kurikulum dan Modul Ketahanan Keluarga (BPPM) Tahun 2016
- Penyusunan Grand Desain Ketahanan Keluarga (BPPM DIY Tahun 2017)
- Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga (dalam RKPD, Renstra, NYIA) BPPM DIY mulai Tahun 2018
- Kajian fungsi keluarga (Biro Kesra Setda DIY) Tahun 2017
- Penyusunan Perda Ketahanan Keluarga di Provinsi DIY (Inisiasi DPRD) Tahun 2017

Penyusunan Grand Design Ketahanan Keluarga DIY



KEBIJAKAN



- Menjadikan isu Ketahanan Keluarga (KK) sebagai **tema utama** setiap OPD, institusi pendidikan, dan lembaga masyarakat
- Memahami masyarakat bahwa pembangunan KK merupakan **program seumur hidup**
- **Mengintegrasikan** setiap program KK ke seluruh OPD dan *stake holder*
- Mendorong pendekatan **makro dan mikro**, termasuk sistem dan infrastruktur

TAHAPAN



- *Program Goal:*

Terciptanya keluarga tangguh DIY yang mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat DIY yang berkarakter, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera, menyongsong peradaban baru.

- *Program Purpose:*

Keluarga tangguh menjadi orientasi dan arah gerak masyarakat yang dimotori oleh Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan dan dukungan Organisasi Masyarakat.

OUTCOME



- **Tahap 1: Adanya kebijakan Daerah tentang ketahanan keluarga (4 Kegiatan)**
- **Tahap 2 Adanya indikator ketahanan keluarga dalam perencanaan setiap OPD (5 Kegiatan)**
- **Tahap 3 Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan keluarga (4 Kegiatan)**
- **Tahap 4 Adanya kesadaran semua elemen bahwa ketahanan keluarga dibangun sepanjang rentang kehidupan (2 Kegiatan)**
- **Tahap 5 Terbentuknya lingkungan ramah keluarga termasuk dalam tata ruang dan tata kota (6 kegiatan)**

Multi Stake Holder Ketahanan Keluarga

No	Lingkup	Sasaran	Produk	Stake Holder
1.	Kebijakan Ramah Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan Ketahanan keluarga dalam pembangunan daerah 2. Payung hukum kebijakan proteksi, fasilitasi dan recovery. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah DIY 2. Peraturan Gubernur 3. Perda Kab/Kota 4. Peraturan Bupati/ Walikota 	Pemda, DPRD
2.	Lingkungan Ramah Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan tempat tinggal 2. Lingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan libur untuk mendukung Family Time 2. Ruang pengasuhan/ penitipan anak di tempat kerja. 3. Wahana keluarga → perpusatakaan, ruang publik 	Badan Perpusda, Dinas Tenaga Kerja, Tapem, Pihak Swasta dan Masyarakat.
3.	Keluarga Tangguh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi keluarga. 2. Bekal berkeluarga 3. Bekal pasca perkawinan 4. Pendampingan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum muatan keluarga (PAUD-SMA). 2. Pendidikan Orang tua (Parenting) 3. Kursus Calon Manten (caten) 4. Pelatihan kewirausahaan pemuda 5. Konselor keluarga 6. dll 	Dikpora, BPPM, Disperindagkop, Kanwil Kemenag, BKKBN, Relawan Konselor Keluarga

Rancangan Program Ketahanan Keluarga (2017-2020)

**Tahap I (2017)
Penyiapan**

Grand Design Ketahanan Keluarga

Penyusunan Naskah Akademik

Analisis kelembagaan dan stakeholder

**Tahap II (2018)
Pemantapan**

Penyusunan Regulasi (Perda / Pergub)

Uji coba 10 desa keluarga tangguh

-Rekrutmen konselor

- Pelatihan

-Implementasi penugasan konselor di masyarakat

Monev konselor

Evaluasi konselor

Perluasan Desa Keluarga Tangguh

**Tahap III (2019)
Penguatan**

Penyusunan regulasi

Penyusunan kurikulum muatan keluarga untuk TK - SMA

Perluasan Desa Keluarga Tangguh

Uji coba kurikulum keluarga di TK - SMA

- - Monev

**Tahap IV (2020)
Pengembangan**

Perluasan Desa / RW Keluarga Tangguh

Pelatihan guru Dalam implemmtasi

Implementasi kurikulum

Replikasi di Kab/Kota

REKOMENDASI HARAPAN DALAM PERDA



- Diperlukan pembekalan pendidikan berkeluarga kepada semua warga masyarakat dalam penyiapan keluarga baru
- Diperlukan legalitas tambahan dalam pendaftaran pernikahan misal : sertifikat penyuluhan pernikahan yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah.
- Dalam penyiapan ketahanan keluarga yang tangguh menjadi kewenangan Pemerintahan Desa
- Pembagian peran dalam penyiapan ketahanan keluarga perlu dilakukan demi terwujudnya keluarga yang tangguh dan berbudaya.
- Muatan lokal dalam pendidikan berkeluarga atau karakter budaya lokal perlu di tanamkan sejak sekolah

A woman in traditional Balinese attire is performing a dance on a stage. She is wearing a black and gold patterned top, a red and white patterned skirt, and a large, ornate gold headdress. She is holding a small object in her hands, possibly a prop or a piece of jewelry. The background shows a wooden structure with a thatched roof and a decorative archway. Other people are visible in the background, some sitting and some standing. The scene is lit with warm, golden light.

Maturnuwun